

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI BELANJA DAERAH KOTA PALOPO

Andini^{1*}
I Ketut Patra^{2*}
Rian Maming^{3*}

Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Muhammadiyah Palopo
Email : immawatiandini@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the factors that influence regional spending in Palopo City. This research is descriptive quantitative. This research data is secondary data sourced from the Central Bureau of Statistics of the City of Palopo. The analytical method used is multiple regression analysis with the help of the SPSS version 23 program. The test results show a coefficient of determination of 0.979 or 97.9% where the independent variable affects the dependent variable while the remaining 3.1% is influenced by other variables outside of this research model. . Partially, the Regional Original Revenue (X1) variable has a positive effect on Regional Expenditure (Y) of Palopo City, while partially the General Allocation Fund (X2) and Special Allocation Fund (X3) variables have no effect on Regional Expenditure (Y) of Palopo City.

Keyword : PAD, DAU, DAK, Regional Expenditure

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi belanja daerah Kota Palopo. Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif. Data penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Kota Palopo. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan bantuan program SPSS versi 23. Hasil pengujian menunjukkan nilai koefisien determinasi sebesar 0,979 atau 97,9% dimana variabel independent mempengaruhi variabel dependent sedangkan sisanya sebesar 3,1% dipengaruhi oleh variabel lain diluar dari model penelitian ini. Secara parsial variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah (Y) Kota Palopo, sedangkan secara parsial variabel Dana Alokasi Umum (X2) dan Dana Alokasi Khusus (X3) tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah (Y) Kota Palopo.

Kata Kunci : PAD, DAU, DAK dan Belanja Daerah

PENDAHULUAN

Tanggal 2 Juli 2002, merupakan salah satu tonggak sejarah perjuangan pembangunan Kota Palopo, dengan ditandatanganinya prasasti pengakuan atas daerah otonom Kota Palopo oleh bapak menteri dalam negeri republik Indonesia, berdasarkan undang-undang No. 11 tahun 2002 tentang pembentukan daerah otonom.

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun masalah yang penting dalam kerangka otonomi daerah adalah menyangkut pembagian atau perimbangan antara pusat dan daerah. Otonomi daerah bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan masyarakat dan meningkatkan kualitas layanan publik agar lebih efisien dan dependensif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik dan kebutuhan masyarakat di daerah. Pemerintah daerah bersama-sama DPRD terlebih dahulu menentukan kebijakan umum tentang APBD sebagai pedoman dalam pengalokasian sumber daya. Pengalokasian sumber daya ke dalam anggaran belanja modal merupakan sebuah proses yang sarat dengan kepentingannya. Anggaran ini sebenarnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana umum yang disediakan oleh pemerintah. Namun, dengan adanya kepentingan politik dari lembaga legislatif yang terlibat dalam penyusunan proses anggaran terkadang menyebabkan alokasi belanja modal sering tidak efektif dalam menyelesaikan masalah

di tengah-tengah masyarakat. Dalam teori keagenan terdapat perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal, sehingga mungkin saja pihak agen tidak selalu melakukan tindakan terbaik bagi kepentingan prinsipal. Teori keagenan merupakan cabang dari game theory yang mempelajari suatu model kontraktual yang mendorong agen untuk bertindak bagi prinsipal saat kepentingan agen bisa saja bertentangan dengan kepentingan prinsipal. Prinsipal mendelegasikan pertanggungjawaban atas pengambilan keputusan kepada agen, dimana wewenang dan tanggung jawab agen maupun prinsipal diatur dalam kontrak kerja atas persetujuan bersama.

Adapun kaitan teori keagenan dalam penelitian ini dapat dilihat melalui hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penyaluran dana perimbangan dan juga hubungan antara masyarakat dengan pemerintah daerah. Pemerintah pusat melakukan pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah dengan mengatur secara mandiri segala aktivitas pemerintahan didaerahnya. Oleh karena itu konsekuensi dari pelimpahan wewenang tersebut, maka pemerintah pusat menurunkan dana perimbangan yang tujuannya untuk membantu pemerintah daerah dalam mendanai kebutuhan pemerintah daerah sehari-hari maupun member pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Selain itu, teori keagenan juga berhubungan dengan pemerintah daerah dengan masyarakat, dimana masyarakat sebagai prinsipal telah memberikan sumber daya kepada daerah berupa pembayaran pajak, retribusi daerah dan sebagainya untuk dapat meningkatkan pendapatan daerah, pemerintah selaku agen dalam hal ini sudah seharusnya

memberikan timbal balik kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik yang memadai yang di danai oleh pendapatan daerah itu sendiri.

Peningkatan alokasi belanja modal dalam bentuk aset tetap yang meliputi infrastruktur, peralatan, sarana dan prasarana sangat penting untuk meningkatkan produktivitas perekonomian karena semakin tinggi belanja modal semakin tinggi pula produktivitas perekonomian. Oleh karena itu, adanya otonomi daerah sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangannya sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan strategis yang dapat memengaruhi kemajuan daerahnya. Pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya terfokus kepada dana bantuan dari pusat dalam bentuk dana perimbangan saja. Lebih penting dari itu adalah daerah dapat mandiri untuk mengurus rumah tangganya sendiri termasuk kemandirian keuangan daerah dengan memanfaatkan dan mendayagunakan serta mengelola potensi-potensi yang ada di daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan pembangunan daerah. Pembangunan ekonomi ini ditandai dengan meningkatnya produktivitas dan meningkatnya pendapatan perkapita penduduk sehingga terjadi perbaikan kesejahteraan bagi masyarakat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber utama pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tidak hanya itu, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang merupakan dana yang

bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan (Syukri, 2018).

Adapun permasalahan yang terjadi saat ini adalah pemerintah daerah terlalu menggantungkan dana transfer dari pemerintah pusat untuk membiayai belanja daerah tanpa mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh daerahnya. Disaat dana transfer yang diperoleh lebih besar, maka pemerintah daerah berusaha agar pada periode berikutnya dana transfer yang diperoleh tetap atau lebih dari tahun sebelumnya. PAD yang seharusnya merupakan aspek penting dalam keberhasilan pelaksanaan otonomi yang kenyataannya yang terjadi adalah dana transfer yang justru dijadikan sumber penerimaan utama daerah dibandingkan dengan PAD (Nisa, 2011). Ketergantungan yang tinggi terhadap transfer pemerintah pusat telah menyebabkan kurangnya intensif pencarian sumber-sumber untuk menutupi biaya daerah. Kondisi ini ditunjukkan dengan besarnya dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah yang tidak sebanding dengan nilai PAD yang mampu dikumpulkan oleh daerah

Menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2004 Pasal 1, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan

kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. PAD,DAU dan DAK merupakan sarana penting untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Demikian Pula Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau rencana keuangan, menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan publik. APBD mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan potensi dan sumber kekayaan daerah. Jika suatu daerah atau daerah memiliki potensi besar untuk pembangunan berkelanjutan, maka sangat memungkinkan untuk mendapatkan anggaran daerah yang besar.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Bella Apriliani Putri pada tahun 2017 menunjukkan bahwa variabel PAD, DAU dan DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Kemudian kembali diteliti oleh Liana Dwi Astuti tahun 2018 yang hasilnya adalah variabel PAD dan DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Sedangkan variabel DAK berpengaruh negatif terhadap Belanja Daerah. Berdasarkan dari penelitian sebelumnya bahwa adanya hasil yang berbeda dan tidak konsisten sehingga saya ingin kembali meneliti dengan objek yang berbeda mengenai **“Faktor-faktor yang memengaruhi Belanja Daerah Kota Palopo”**

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas mengenai faktor-faktor apa saja yang memengaruhi Belanja Daerah di Kota Palopo, maka peneliti membuat rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

- a. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah Kota Palopo ?
- b. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Daerah Kota Palopo ?
- c. Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Daerah Kota Palopo ?

Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Kota Palopo ?
- b. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah Kota Palopo ?
- c. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah Kota Palopo ?

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat teoritis dan praktis yaitu :

Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat menjadi bukti empiris menambah pengetahuan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi Belanja Daerah di Kota Palopo.
- b. Untuk membantu para aktivis dan akademisi, penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi terhadap peningkatan literatur perihal ekonomi di sektor publik terkhusus Belanja Daerah di Kota Palopo.

Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Belanja Daerah di Kota Palopo, sehingga pihak yang terkait mampu bekerja dan memberikan pelayanan yang baik.

- b. Sebagai rujukan pemerintah agar lebih memperhatikan pihak-pihak yang terkait dalam proses pemecahan suatu masalah perihal faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Belanja Daerah di Kota Palopo.

TINJAUAN PUSTAKA

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh di kabupaten/daerah yang dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan kabupaten/daerah. Pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah tersendiri, dan penerimaan asli daerah lain yang sah, bertujuan untuk memberikan keleluasaan bagi eksplorasi daerah dan pelaksanaan dana otonomi daerah yang mencerminkan otonomi daerah berdasarkan prinsip desentralisasi.

Adapun jenis-jenis PAD berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah, pendapatan asli daerah bersumber dari :

1. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan usaha.

3. Pendapatan Yang Dipisahkan

Penerimaan PAD yang menduduki peranan penting setelah pajak daerah dan retribusi daerah adalah bagian pemerintah daerah atas laba BUMD untuk tujuan menciptakan lapangan kerja atau mendorong pembangunan ekonomi daerah, BUMD merupakan cara yang lebih efisien dalam melayani masyarakat dan juga merupakan salah satu sumber pendapatan daerah.

4. PAD Lain-lain Yang Sah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 mengatakan bahwa jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan.

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Peraturan pemerintah No.55 Tahun 2005). DAU dapat dikategorikan sebagai transfer tak bersyarat (*unconditional grant*) atau block grant yang merupakan jenis transfer antar tingkat pemerintah yang tidak dikaitkan dengan program pengeluaran tertentu. Tujuan bantuan ini adalah untuk menyediakan dana yang cukup bagi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Sebagai transfer tak bersyarat atau block grant, maka penggunaan dan DAU ditetapkan sendiri oleh daerah. Meskipun demikian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 pasal 15, disebutkan bahwa penggunaan DAU tersebut bertujuan untuk pemerataan kemampuan

keuangandaerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar pada masyarakat.

Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan yang merupakan bagian dari anggaran kementerian negara, yang digunakan untuk melaksanakan urusan daerah, secara bertahap dialihkan menjadi dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus digunakan untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antardaerah dengan memberi prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup (Sulistiyowati, 2011).

Belanja Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, belanjadaerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaanbersih dalam periode anggaran yang bersangkutan. Seluruh pendapatan daerah yangdiperoleh dari daerahnya sendiri maupun transfer dan bantuan pemerintah pusat,pemerintah provinsi, dan sebagainya akan digunakan untuk membiayai seluruhpengeluaran daerah baik melalui pos belanja daerah maupun pengeluaranpembayaan. Definisi lain belanja daerah yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun2005 tentang Pengelolaan Keuangan Dearah pasal 26 ayat (1) menyebutkan bahwabelanja daerah digunakan dalam

rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yangmenjadi kewenangan provinsi atau kabupaten dan kota yang terdiri dari urusan wajibdan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan undang-undang.

Hipotesis

- a. H1 : Diduga bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah Kota Palopo.
- b. H2 : Diduga bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Daerah Kota Palopo.
- c. H3 : Diduga bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Daerah Kota Palopo.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian empiris dimana data yang diperoleh dalam bentuk sesuatu yang dapat dihitung/angka.Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (*time series*). Sementara untuk sumber data diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Palopo tahun 2011-2020 dan bahan-bahan kepustakaan berupa bacaan yang berhubungan dengan penelitian, website, artikel dan jurnal.

Populasi penelitian ini adalah data laporan dana PAD, DAU , DAK serta Belanja Daerah. Sedangkan yang menjadi sampel penelitian ini adalah keseluruhan jumlah populasi yang berhubungan dengan data PAD, DAU, DAK serta Belanja Daerah selama sepuluh tahun (2011-2020).

Hasil Penelitian

Tabel 4.1

**Data Hasil Rekapitulasi Pengeluaran
PAD, DAU, DAK dan Belanja Daerah
Kota Palopo tahun 2011-2020**

Selanjutnya PAD di tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp. 318,742,117,000,00. PAD di tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp. 293,092,118,000,00. Kemudian PAD di tahun 2020 mengalami

TAHUN	PAD	DAU	DAK	BELANJA DAERAH
	X1	X2	X3	Y
2011	Rp 1,038,059,000.00	Rp 255,050,457,000.00	Rp 11,568,296,000.00	Rp 267,656,812,000.00
2012	Rp 1,038,059,000.00	Rp 255,050,457,000.00	Rp 11,568,296,000.00	Rp 267,656,812,000.00
2013	Rp 4,988,209,000.00	Rp 306,504,980,000.00	Rp 11,147,916,000.00	Rp 322,641,107,000.00
2014	Rp 8,068,021,000.00	Rp 346,068,475,000.00	Rp 5,293,305,000.00	Rp 359,429,801,000.00
2015	Rp 3,804,178,000.00	Rp 348,136,247,000.00	Rp 3,485,550,000.00	Rp 358,425,975,000.00
2016	Rp 393,430,293,000.00	Rp 41,019,773,389,000.00	Rp 5,443,245,000.00	Rp 41,957,528,182,000.00
2017	Rp 352,787,200,000.00	Rp 33,278,831,286,000.00	Rp 14,417,145,100.00	Rp 35,099,536,675,000.00
2018	Rp 318,742,117,000.00	Rp 37,608,299,001,000.00	Rp 3,766,324,488.00	Rp 41,693,365,606,000.00
2019	Rp 293,092,118,000.00	Rp 39,805,805,283,000.00	Rp 1,318,250,000.00	Rp 41,417,147,401,000.00
2020	Rp 290,800,426,000.00	Rp 39,695,670,268,000.00	Rp 892,474,022,000.00	Rp 41,677,122,316,000.00

Sumber : Data BPS Kota Palopo
Lampiran 1, 2021

a. PAD di tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp 1,038,059,000.00. PAD di tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar Rp. 4,988,209,000,00. PAD di tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar Rp. 8,068,021,000,00. PAD di tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar Rp. 3,804,178,000,00. PAD di tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp. 393,430,293,000,00. PAD di tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp. 352,787,200,000,00.

peningkatan sebesar Rp.
290,800,426,000,00.

b. DAU di tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp. 255,050,457,000,00. DAU di tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar Rp. 306,504,980,000,00. PAD di tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar Rp. 346,068,475,000,00. PAD di tahun 2015 mengalami penurunan sebesar Rp. 348,136,247,000,00. PAD di tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp.41,019,773,389,000,00. PAD di tahun 2017 dan 2018 mengalami

- penurunan sebesar Rp. 33,278,831,286,000,00. PAD di tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp. 37,608,299,001,000,00. Kemudian PAD di tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 39,695,670,268,000,00.
- c. DAK di tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp. 11568,296,000,00. DAK di tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar Rp. 11,147,916,000,00. DAK di tahun 2014 mengalami penurunan sebesar Rp. 5,293,305,000,00. DAK di tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar Rp. 3,485,550,000,00. DAK di tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp. 5,443,245,000,00. DAK di tahun 2017 mengalami penurunan sebesar Rp. 14,417,145,100,00. Selanjutnya DAK di tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp. 3,766,324,488,00. DAK di tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp. 1,318,250,000,00. Kemudian DAK di tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 892,474,022,000,00.
- d. Belanja Daerah Kota Palopo di tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp. 267,565,812,000,00. Belanja Daerah Kota Palopo di tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar Rp. 322,641,107,000,00. Belanja Daerah Kota Palopo di tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar Rp. 359,429,801,000,00. Belanja Daerah Kota Palopo di tahun 2015 mengalami penurunan sebesar Rp. 358,425,975,000,00. Belanja Daerah Kota Palopo di tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp. 41,957,528,182,000,00. Belanja Daerah Kota Palopo di tahun 2017 mengalami penurunan sebesar Rp. 35,099,536,675,000,00. Belanja

Daerah Kota Palopo di tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp. 41,693,365,606,000,00. Belanja Daerah Kota Palopo di tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp. 41,417,147,401,000,00. Belanja Daerah Kota Palopo di tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 41,677,122,316,000,00.

Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		10
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	863.25286663
Most Extreme Differences	Absolute Positive	.319
	Negative	-.118
Kolmogorov-Smirnov Z		1.008
Asymp. Sig. (2-tailed)		.261

Sumber : Hasil olah data SPSS, 2021

Dari hasil Uji Normalitas menggunakan Metode One-Sample Kolmogorov Smirnov Test didapatkan hasil signifikan dari uji normalitas sebesar 0,261 dimana hasil tersebut lebih besar dari taraf signifikan 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Uji Normalitas pada penelitian ini adalah terdistribusi normal.

Uji Multikolonelitas

Sumber : Hasil olah data SPSS, 2021

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami gangguan multikolinieritas, hal ini sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji multikolinieritas dengan melihat nilai Tolerance dan VIF. Berdasarkan outpunya

nilai tolerance variabel PAD (X1) sebesar 0,865 > 0,10 , variabel DAU (X2) sebesar 0,579 > 0,10 dan variabel DAK (X3) sebesar 0,591 > 0,10. Sementara nilai VIF untuk variabel PAD (X1) sebesar 1,156 < 0,10 , variabel DAU (X2) sebesar 1,726 < 0,10 dan variabel DAK (X3) sebesar 1,692 < 0,10 yang artinya bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas.

Coefficients ^a								
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error				Beta	Tolerance	VIF
1	(Constant)	-108770.296	1847.4291	-5.888	.001			
	PAD	.384	.083	.549	4.649	.004	.909	1.100
	DAU	1.988	.294	.892	6.752	.001	.726	1.377
	DAK	1.634	.300	.721	5.441	.002	.722	1.384

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

Sumber : Hasil olah data SPSS, 2021

Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.989 ^a	.979	.968	1057.265	2.046

a. Predictors: (Constant), DAK, PAD, DAU

b. Dependent Variable: Belanja Daerah

Sumber : Hasil olah data SPSS, 2021

Berdasarkan hasil Uji Autokorelasi menghasilkan nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 2.046. Nilai tabel dengan menggunakan alpha 5% atau 0,05 dengan jumlah sampel sebanyak 10 dan jumlah

variabel independen 3, maka pada tabel Durbin-Watson diperoleh dL = 0,5253 dan dU = 2.0163.

Uji Heterokedastisitas.

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	-.464	.455		-1.019	.347
LNx1	-.005	.012	-.192	-.404	.700
LNx2	.051	.054	.538	.943	.382
LNx3	.000	.010	-.010	-.020	.985

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber : Hasil olah data SPSS, 2021

Berdasarkan hasil output diatas diketahui nilai signifikan (sig) variabel PAD (X1) adalah 0,700 > 0,05 , variabel DAU (X2) adalah 0,382 > 0,05 dan variabel DAK (X3) adalah 0,985 > 0,05 maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji gletser, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	157.537	2466.182		.064	.951
1 PAD	-.007	.019	-.025	-.383	.715
DAU	1.054	.082	1.003	12.809	.000
DAK	-.002	.017	-.009	-.112	.914

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

Sumber : Hasil olah data SPSS, 2021

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4.6 diatas maka model untuk menguji PAD, DAU dan DAK dalam memengaruhi belanja daerah Kota Palopo selama periode 2011-2020 adalah sebagai berikut:

$$Y = 157,537 - 0,007 X_1 + 1,054 X_2 - 0,002 X_3 + e$$

Interpretasi dari persamaan regresi linear berganda diatas adalah sebagai berikut:

1. Nilai konstanta (a) diperoleh sebesar 157,537 artinya adalah variabel PAD, DAU dan DAK berpengaruh terhadap belanja daerah Kota Palopo dengan nilai konstan atau sama dengan nol (0), belanja daerah nilainya sebesar 157,537 (dalam satuan logaritma natural).
2. Nilai koefisien regresi variabel PAD (X1) sebesar -0,007 artinya bahwa setiap kenaikan satu satuan, maka akan diikuti dengan penurunan jumlah belanja daerah sebesar -0,007 atau tujuh ribu rupiah dengan asumsi variabel lain bernilai tetap.
3. Nilai koefisien regresi variabel DAU (X2) sebesar 1,054 artinya bahwa setiap kenaikan satu satuan, maka akan diikuti dengan kenaikan jumlah belanja daerah sebesar 1,054 dengan asumsi variabel lain bernilai tetap.
4. Nilai koefisien regresi variabel DAK (X3) sebesar -0,002 artinya bahwa setiap kenaikan satu satuan, maka akan diikuti dengan penurunan jumlah belanja daerah sebesar -0,002 atau dua ribu dengan asumsi variabel lain bernilai tetap.

Uji Hipotesis

Koefisien Determinan (R²)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.989 ^a	.979	.968	1057.265

a. Predictors: (Constant), DAK, PAD, DAU

b. Dependent Variable: Belanja Daerah

Sumber : Hasil olah data SPSS, 2021

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan bahwa nilai R Square (R²) adalah 0,979 artinya bahwa 97,9% variabel belanja daerah dapat dijelaskan oleh variabel PAD (X1) variabel DAU (X2) variabel DAK (X3). Sedangkan sisanya sebesar 3,1% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

Uji Parsial (t)

1. Uji hipotesis PAD (X1) terhadap Belanja Daerah Kota Palopo.
Berdasarkan output tabel 4.6 dapat diketahui bahwa nilai t Hitung sebesar -0,383 dan nilai t Tabel sebesar 2,015 sedangkan nilai signifikannya sebesar 0,715 artinya bahwa nilai t Hitung < t Tabel dan signifikansi > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel PAD secara parsial tidak berpengaruh dan signifikan terhadap Belanja Daerah Kota Palopo.
2. Uji hipotesis DAU (X2) terhadap Belanja Daerah Kota Palopo.
Berdasarkan output tabel 4.6 dapat diketahui bahwa nilai t Hitung sebesar 12,809 dan nilai t Tabel sebesar 2,015 sedangkan nilai signifikannya sebesar 0,000 artinya bahwa nilai t Hitung > t Tabel dan signifikansi < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel DAU secara parsial

berpengaruh terhadap Belanja Daerah Kota Palopo.

3. Uji hipotesis DAK (X3) terhadap Belanja Daerah Kota Palopo.

Berdasarkan output tabel 4.6 dapat diketahui bahwa nilai t Hitung sebesar -0,112 dan nilai t Tabel sebesar 2,015 sedangkan nilai signifikansinya sebesar 0,914 artinya bahwa nilai t Hitung $<$ t Tabel dan signifikansi $<$ 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel DAK secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Kota Palopo.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Kota Palopo

Dari hasil pengujian statistik secara parsial yang telah dilakukan antara variabel PAD terhadap Belanja Daerah menunjukkan bahwa nilai t Hitung $-0,383 <$ nilai t Tabel 2,015 sedangkan nilai signifikannya sebesar $0,715 >$ 0,05 serta nilai koefisien regresinya sebesar -0,007 yang artinya setiap kenaikan satu satuan PAD maka akan diikuti dengan penurunan Belanja Daerah sebesar -0,007 atau tujuh ribu rupiah sehingga dapat disimpulkan bahwa Variabel PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Kota Palopo. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi PAD maka Belanja Daerah akan semakin meningkat, begitu pula sebaliknya jika semakin rendah PAD maka Belanja Daerah akan semakin rendah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang harus terus dipacu pertumbuhannya. Pendapatan Asli daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang baik dan diikuti dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah sehingga akan meningkatkan

Belanja Daerah pada daerah tersebut. Berdasarkan hasil penelitian diatas, yaitu semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dan pemanfaatan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang benar membuat besaran dana yang disalurkan pemerintah daerah untuk melakukan Belanja Daerah dapat menjadi besar. Dengan demikian hipotesis pertama ditolak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Joice Machmud dan Lukhfiah Irwan Radjak (2018) dan Arbia Gugus Wandira (2013). Sedangkan penelitian berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hinaya (2019), Hairiyah Lewi Malisan dan Zaki Fakhroni (2017), Deva Yoga Permana (2013), Santika Adhi Karyadi (2017), Reza Marizka (2013) dan Safiul Huda dan Ati Sumiati (2019).

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah Kota Palopo

Dari hasil pengujian statistik secara parsial yang telah dilakukan antara variabel DAU terhadap Belanja Daerah menunjukkan bahwa nilai t Hitung $12,809 >$ nilai t Tabel 2,015 sedangkan nilai signifikannya sebesar $0,000 <$ 0,05 serta nilai koefisien regresinya sebesar -0,002 yang artinya setiap kenaikan satu satuan DAU maka akan diikuti dengan kenaikan Belanja Daerah sebesar -0,002 atau dua ribu sehingga dapat disimpulkan bahwa Variabel DAU berpengaruh dan signifikan terhadap Belanja Daerah Kota Palopo. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Dana Alokasi Umum maka Belanja Daerah akan semakin meningkat, begitu

pula sebaliknya jika semakin rendah Dana Alokasi Umum maka Belanja Daerah akan semakin rendah.

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan. Hal ini berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Transfer ini cukup signifikan sehingga pemerintah daerah dapat menggunakannya untuk member pelayanan publik yang lebih baik. Dana Alokasi Umum (DAU) dapat dikategorikan sebagai transfer tak bersyarat atau block grant yang merupakan jenis transfer antar tingkat pemerintah yang tidak dikaitkan dengan program pengeluaran tertentu. Tujuan dari penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) ini adalah untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar pada masyarakat. Berdasarkan dari hasil penelitian diatas yaitu semakin besar Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima oleh pemerintah daerah maka dapat menyebabkan semakin besar pula kegiatan Belanja Daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu hipotesis kedua diterima.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Joice Machmud dan Lukfiah Irwan Radjak (2018), Deva Yoga Permana (2013), Santika Adhi Karyadi (2017), Arbia Gugus Wandira (2013), Saiful Huda dan Ati Sumiati (2019), Muhammad Syukri dan Hinaya (2019) dan Hapid, Muh. Halim, Yuli Wulandari (2015). Sedangkan penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hairiyah Lewi Malisan dan Zaki Fakluroni (2017) dan Reza Marizka (2013).

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah Kota Palopo

Dari hasil pengujian statistik secara parsial yang telah dilakukan antara variabel DAK terhadap Belanja Daerah menunjukkan bahwa nilai t Hitung $-0,112 < \text{nilai } t \text{ Tabel } 2,015$ sedangkan nilai signifikannya sebesar $0,914 < 0,05$ serta nilai koefisien regresinya sebesar $-0,002$ yang artinya setiap kenaikan satu satuan DAK maka akan diikuti dengan penurunan Belanja Daerah sebesar $-0,002$ atau dua ribu sehingga dapat disimpulkan bahwa Variabel DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Kota Palopo. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Dana Alokasi Khusus maka Belanja Daerah akan semakin meningkat, begitu pula sebaliknya jika semakin rendah Dana Alokasi Khusus maka Belanja Daerah akan semakin rendah. Hasil ini menjelaskan bahwa kabupaten dan kota yang mendapatkan Dana Alokasi Khusus yang besar cenderung memiliki Belanja Daerah yang besar pula. Oleh karena itu hipotesis ketiga ditolak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Saiful Huda dan Ati Sumiati (2019), dan Deva Yoga Permana (2013). Sedangkan penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Joice Machmud dan Lukfiah Irwan Radjak (2018), Santika Adhi Karyadi (2017), Arbia Gugus Wandira (2013), Muhammad Syukri dan Hinaya (2019), Hairiyah Lewi Malisan dan Zaki Fakluroni (2017) dan Hapid, Muh. Halim, Yuli Wulandari (2015) dan Reza Marizka (2013).

Kesimpulan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi belanja daerah Kota Palopo

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) tidak berpengaruh dan signifikan terhadap belanja daerah kota palopo. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan asli daerah kota palopo maka semakin tinggi juga belanja daerah kota palopo.
- b. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa dana alokasi umum (DAU) berpengaruh dan signifikan terhadap belanja daerah kota palopo. Hal ini menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja daerah kota palopo.
- c. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa dana alokasi khusus (DAK) berpengaruh tidak berpengaruh dan signifikan terhadap belanja daerah kota palopo. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik dana alokasi khusus kota palopo maka semakin baik juga belanja daerah kota palopo.
- d. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap belanja daerah kota palopo. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) Kota Palopo maka semakin baik pengelolaan Belanja Daerah Kota Palopo.

Saran

Dalam menyelesaikan penelitian ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan penelitian, oleh karena itu penulis memberikan saran kepada penelitian selanjutnya, diantaranya:

- a. Dalam penelitian masih terdapat beberapa kendala dalam pengumpulan data, dikarenakan beberapa data tidak tersedia sehingga penelitiannya memperoleh data dari beberapa platform website yang bentuk penyajiannya masih terbatas. Oleh karena itu diharapkan, penelitian selanjutnya dapat memperoleh data yang lebih lengkap.
- b. Apabila hendak melakukan penelitian terkait pengeluaran pemerintah, agar menggunakan data realisasi pengeluaran pemerintah yang mencakup Kabupaten/Kota yang menyeluruh dalam kurun waktu kurang lebih 15 tahun untuk lebih mudah melihat pengaruh yang ditimbulkan.

Daftar Rujukan

Agung, A., Mantra, G., Yintayani, N. N., Ardina, C., Luh, N., Ayu, N., & Susilawati, S. (2019). *Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah serta Dampaknya pada Kemandirian Keuangan Daerah tujuan wisata bagi masyarakat , tak hanya masyarakat internasional. Wisatawan yang diharapkan diandalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali . A. 15(3), 185–194.*

Andi Ernawati Da Costa, M. H. (2021). *Pengaruh Pajak Daerah Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja*

Modal Pemerintah Kota Palopo. 32, 58.
<http://repository.umpalopo.ac.id/852/>

Asti Mutiara. (2020). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal*.

Bella Apriliani Putri. (2017). *Analisis Fylpaper Effect Dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara Periode 2012-2015*.

Deva Yoga Permana. (2013). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*.

Ferdiansyah, I., Deviyanti, D. R., & Pattisahusiwa, S. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana perimbangan terhadap belanja daerah. *Inovasi*, 14(1), 44.
<https://doi.org/10.29264/jinv.v14i1.3546>

Hairiyah, H., Malisan, L., & Fakhroni, Z. (2018). Pengaruh dana alokasi umum DAU dana alokasi khusus DAK dan pendapatan asli daerah PAD terhadap belanja modal. *Kinerja*, 14(2), 85.
<https://doi.org/10.29264/jkin.v14i2.2483>

Hapid, Halim, M., & Wulandari, Y. (2016). Pengaruh Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 2(1), 1–7.
<https://doi.org/10.35906/jep01.v2i1.152>

Huda, S., & Sumiati, A. (2019). Pengaruh Pad, Dau, Dan Dak Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 14(1), 85–100.
<https://doi.org/10.21009/wahana.14.016>

Iis Apriliya Laska. (2018). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah Di Kota Palembang*.

Iqbal, M., Tarmizi, A., & Ratna. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Otonomi Khusus terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Manajemen Indonesia (J-MIND)*, 5(2), 1–13.

Karyadi, S. A. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli daerah, Dana Alokasi Umum Dan Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota DI Propinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2012. *Jurnal Profita*, 4, 1–22.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emb/article/view/3347>

Machmud, J., & Radjak, L. I. (2018). Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo. *Journal of Accounting Science*, 2(1), 17.
<https://doi.org/10.21070/jas.v2i1.1106>

Mardani Nursali. (2017). *Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan*.

Nisa Maharani S. (2011). *Pengaruh Realisasi Belanja Daerah dan Angkatan Kerja Terhadap Output dan Pendapatan Per Kapita (Studi Kasus Provinsi Jawa Tengah)*.

Pungky Ardhani. (2011). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah). *Diponegoro Journal of Accounting*, 0(0).

Reza Marizka. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Barat (Tahun 2006 – 2011). *Journal of Petrology*, 369(1), 1689–1699.

<http://dx.doi.org/10.1016/j.jsames.2011.03.003><https://doi.org/10.1016/j.gr.2017.08.001><http://dx.doi.org/10.1016/j.precamres.2014.12.018><http://dx.doi.org/10.1016/j.precamres.2011.08.005><http://dx.doi.org/10.1080/00206814.2014.902757><http://dx.doi.org/10.1016/j.jsames.2011.03.003>

Sugiyono.2019. *Matode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta.

Suliyanto. 2011. *Ekonometrika Teori Pengantar*. Andi. Yogyakarta.

Syukri, M., & Hinaya, H. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten & Kota Provinsi Sulawesi Selatan. *JEMMA | Journal of Economic,*

Management and Accounting, 2(2), 30. <https://doi.org/10.35914/jemma.v2i2.245>

Wandira, A. G. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi Se Indonesia Tahun 2012). In *Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang*.